

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Reformasi di berbagai bidang yang sedang berlangsung di Indonesia telah membawa perubahan terhadap sistem politik, sosial, kemasyarakatan serta ekonomi, sehingga menimbulkan tuntutan yang beragam terhadap pengelolaan pemerintah yang baik (Badjuri dan Triharsari, 2014). Namun pada kenyataannya, pemerintah daerah umumnya belum menjalankan fungsi dan peranan secara efisien, terutama dalam pengelolaan keuangan daerah (Abdul Halim, 2007:23). Konsekuensi implementasi dari Otonomi Daerah, Pemerintah daerah dituntut untuk mampu mengelola keuangannya mulai dari perencanaan sampai dengan realisasi dan pertanggungjawabannya, termasuk di dalamnya pengamanan atas aset pemerintah daerah yang di biayai dengan anggaran Pemerintah secara efektif dan efisien (Abdul Halim, 2007:271).

Keberhasilan pengelolaan keuangan daerah mempunyai dampak langsung terhadap keberhasilan otonomi daerah dan sumbangan yang besar dalam upaya mewujudkan akuntabilitas (Nurlan Darise, 2008:2). Laporan keuangan disusun untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermamfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya (Erlina Rasdianto, 2013:21). Secara khusus tujuan laporan keuangan menyajikan informasi yang berguna untuk

pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakannya kepadanya (Erlina Rasdianto, 2013:21).

Ditegaskan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 1 paragraf 9. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya (Daniel Kartika Adhi dan Yohanes Suhardjo, 2013). Menurut PSAP 01 paragraf 13, tanggung jawab penyusunan laporan keuangan berada pada pimpinan entitas, dalam pemerintah daerah yang dimaksud pimpinan entitas adalah setiap kepala satuan kerja perangkat daerah (Mursyidi, 2013:63).

Laporan keuangan pemerintah disajikan sebagai wujud pertanggungjawaban setiap entitas pelaporan yang meliputi laporan keuangan pemerintah pusat, laporan keuangan kementerian negara/lembaga, dan laporan keuangan pemerintah daerah (Bastian, 2010:336). Laporan keuangan menggambarkan tentang pencapaian kinerja program dan kegiatan, kemajuan realisasi pencapaian target pendapatan, realisasi penyerapan belanja, serta realisasi pembiayaan (Bastian, 2010:9). Komponen laporan keuangan terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan (Erlina Rasdianto, 2013:23). Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan (Bastian, 2010:9).

Salah satu upaya konkret untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah, yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah di terima secara umum (Bastian, 2010:137). Standar akuntansi diperlukan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan yaitu meningkatkan konsistensi, daya banding, keterpahaman, relevansi, dan keandalan laporan keuangan (Mahmudi, 2011:271). Standar akuntansi pemerintahan diterapkan di lingkup pemerintahan, baik di pemerintah pusat dan departemen-departemennya maupun di pemerintahan daerah dan dinasnya (Deddi Nordiawan, 2009:25). Penerapan standar akuntansi pemerintahan diyakini berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintah pusat dan daerah (Deddi Nordiawan, 2009:25).

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah (Bastian, 2010:138). Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah (Bastian, 2010:138). Melalui penerapan SAP akan dapat disusun laporan keuangan yang *useful* (Daniel Kartika Adhi dan Yohanes Suhardjo, 2013). Aset adalah barang yang dalam pengertian hukum disebut benda, yang terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak (Doli D. Siregar, 2004:37), Pengelolaan aset daerah merupakan komponen yang sangat penting untuk mewujudkan laporan keuangan yang baik (Doli D. Siregar, 2004:50) Kegunaan laporan keuangan ditentukan oleh isi informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut

(Daniel Kartika Adhi dan Yohanes Suhardjo, 2013). Agar laporan keuangan berisi informasi yang bermakna maka laporan keuangan harus disusun berpedoman pada SAP (Daniel Kartika Adhi dan Yohanes Suhardjo dan Yohanes Suhardjo, 2013).

Informasi dalam bentuk laporan keuangan yang dipublikasikan oleh pemerintah daerah, akan sangat diperlukan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan berbagai pihak. Oleh karena itu, informasi tersebut harus bermanfaat bagi para pemakai atau dengan kata lain, bahwa informasi harus mempunyai nilai (Suwardjono 2005). Laporan keuangan dalam sektor publik terbagi menjadi dua yaitu laporan keuangan yang menunjukkan posisi keuangan organisasi pada waktu tertentu dan laporan keuangan yang menjelaskan perubahan atau posisi keuangan tersebut (Deddi, Ayuningtyas, 2014:129). Laporan keuangan yang berkualitas harus mempunyai nilai informasi yang berkualitas karena, informasi berkualitas yang bermanfaat bagi para pemakai adalah informasi yang mempunyai nilai, informasi akan bermanfaat apabila informasi dapat mendukung pengambilan keputusan dan andal (Suwardjono, 2005 dalam Andra Kusuma, 2014)

Transparansi laporan keuangan pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan yang akan di gunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik (marsido.2014) . Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Dalam penjelasan PP No. 56 Tahun 2005 disebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk

meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan public (Karmila dkk 2014).

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dapat tercermin dari hasil pemeriksaan BPK, pemeriksaan atas laporan keuangan dilakukan dalam rangka memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan (Ifa Ratifah, 2012:30). Terdapat empat opini yang diberikan pemeriksa yaitu: Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TW), dan Pernyataan Menolak memberi Opini atau Tidak Memberi Pendapat (TMP) (Liza rahayu dkk, 2014).

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yaitu penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan tidak terdapat kondisi atau keadaan tertentu yang memerlukan bahasa penjelas, Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yaitu penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum dan berdampak material tetapi tidak mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan, Opini Tidak Wajar (TW) yaitu laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum, Opini Tidak Memberi Pendapat (TMP) yaitu penyimpangan yang material dan prinsip akuntansi yang berlaku umum (Indra Bastian 2006:87).

Badan pemeriksa laporan keuangan (BPK) menemukan masih banyak lahan fiktif di bandung barat dan telah mengkonfirmasi ke dinas pendapatan keuangan dan aset daerah (DPKAD) Bandung Barat. DPKAD KBB mencatat ada sebanyak 17.400 meter persegi lahan fiktif dan berada di desa cileme karena ada nya pelimpahan aset dari Kabupaten Bandung ke KBB sejak 2015 Kepala bidang

DPKAD Kabupaten Bandung Barat, Asep Sudiro mengatakan penyelesaian permasalahan ini di pihaknya terus lakukan koordinasi dengan Kabupaten Bandung Barat agar merevisi penyerahan aset tersebut agar cepat selesai. ini akan berdampak pada opini wajar tanpa pengecualian (WTP) (Asep Sudiro Kepala bidang aset KBB) (tribun, Ichsan, 12/02/2019)

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jabar menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2016, Kabupaten Bandung Barat masih meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat Maman Sunjaya membenarkan hal itu dan menuturkan permasalahan masih di dominasi terkait aset tetap tanah yang dimiliki pemerintah daerah Kab. Bandung Barat yang masih belum bersertifikat, hal ini berpengaruh pada penurunan kualitas laporan keuangan (Maman Sunjaya dalam PikiranRakyat.com 2017). Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika KBB Ludi Awaludin mengatakan bahwa informasi keuangan lambat dan kurang transparan karena masih belum memiliki website dan system yang baik sebagai manfaat teknologi informasi sehingga memudahkan dalam transparansi informasi keuangan daerah secara akurat dan tepat sehingga memperbaiki kualitas laporan keuangan KBB (Ludi Awaludin dalam PikiranRakyat.com 2017). Menurut Kepala BPK Perwakilan Jawa Barat Arman Syifa, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) belum menunjukkan hasil yang maksimal seperti banyaknya opini BPK yang menyatakan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) masih terdapat opini disclaimer juga sejumlah

persoalan perlu mendapat perhatian supaya kualitas tata kelola keuangan lebih baik (Arman Syifa, 2016).

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh M. Ali Fikri Biana Adha Inapty, RR. Sri Pancawati Martiningsih (2016), yang melakukan penelitian pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Penelitian dengan judul Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Aparatur dan Peranan Audit Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan, hasilnya menunjukkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Penelitian yang dilakukan juga menurut Sri ayu wulandari aswadi (2017) yang berjudul Akuntabilitas dan Transparansi laporan keuangan pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Study kasus pada pemerintah kabupaten pinang) dengan hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik melakukan penelitian mengenai masalah diatas dengan judul **“Peningkatan Standar Akuntansi Pemerintah Melalui Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah dan Transparansi Laporan Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pembahasan latar belakang permasalahan dapat diidentifikasi beberapa masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

- 1) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) belum menunjukkan hasil yang maksimal pada pencatatan aset yang di miliki.

- 2) Aset tetap tanah yang dimiliki pemerintah daerah masih banyak yang fiktif dan tidak bersertifikat serta di selewengkan.
- 3) Belum mengoptimalkan transparansi di lingkungan pemerintahan sehingga banyak aset yang rawan di selewengkan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Seberapa besar pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- 2) Seberapa besar pengaruh Transparansi laporan keuangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah mencari, mengumpulkan data-data dan mendapatkan informasi sebagai bahan dalam penelitian yang berkenaan dengan pengaruh standar akuntansi pemerintah dan transparansi laporan keuangan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian menunjukkan hal-hal yang ingin dicapai, sesuai dengan pokok permasalahan. Tujuan penelitian biasanya diawali dengan kata-kata seperti: untuk mengetahui, menghitung, menganalisis, membedakan, dan lain-lain (W.

Gede Merta, 2004:11). Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan diatas adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk menganalisa besarnya pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- 2) Untuk menganalisa besarnya pengaruh transparansi laporan keuangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

1.5 Kegunaan Penelitian

Menurut Hamidi (2007:6) – Penelitian merupakan aktivitas keilmuan yang dilakukan karena ada kegunaan yang ingin dicapai, baik untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia maupun untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.5.1 Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis berkaitan dengan membantu memecahkan dan mengantisipasi masalah yang ada pada objek yang diteliti (Sugiyono 2017:283).

Kegunaan praktis adalah untuk meningkatkan pemahaman terhadap masalah pada judul yang diangkat yang kerap terjadi dan mencari metode untuk memecahkannya (Uma Sekaran, 2006:10).

Kegunaan Praktis dalam penelitian ini yaitu untuk memecahkan masalah yang terjadi di dalam penelitian .

1.5.2 Kegunaan Akademis

Adapun kegunaan penelitian ini adalah dapat bermanfaat secara akademis sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Peneliti mengharapkan hasil penelitian dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan, dan juga memperoleh gambaran langsung tentang pengaruh standar akuntansi pemerintah dan transparansi laporan keuangan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan mengenai standar akuntansi pemerintah dan transparansi laporan keuangan yang diterapkan dalam menunjang kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

3. Bagi peneliti lain

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang kajian yang sama, yaitu standar akuntansi pemerintah dan transparansi laporan keuangan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.